

BAB II

KONDISI AKHIR KERAJAAN TURKI USMANI

A. Gerakan Turki Muda

Kemunculan gerakan Turki Muda pada dasarnya sebagai refleksi atas pergerakan pembaharuan yang terjadi sebelumnya dan melatarbelakangi terjadinya revolusi yang menyebabkan kehancuran bagi Dinasti itu sendiri. Para pelopor gerakan ini mendapatkan pengaruh dari kemajuan-kemajuan yang berhasil di raih oleh bangsa eropa dan kemunduran kekhalifahan Usmaniyah yang terus terpuruk akibat ketertinggalannya dalam berbagai bidang pada saat itu serta kekuasaan Sultan Abdul Hamid II yang absolut. Mereka berkeinginan untuk meniru segala perkembangan yang terjadi pada eropa dengan segala pemikirannya yang mereka anggap modern dan maju untuk diaplikasikan kedalam tatanan lama yang berlaku pada masyarakat Turki. Berawal pada pertengahan tahun 1860 di era yang disebut sebagai era Tanzimat (1839-1871) berdiri sebuah gerakan yang bernama Usmaniyah muda (*Yeni Osmanlilar*). Gerakan ini menandai pembaharuan-pembaharuan selanjutnya yang terjadi di alam pemikiran bangsa Turki kala itu. Kalangan Usmaniyah muda ini berusaha mengadakan konstitusi dan parlemen dengan didukung oleh negara-negara barat. pada tahun 1876 mampu menekan Sultan agar memproklamirkan konstitusi yang benar-benar baru, dan dibentuknya parlemen yang anggotanya dipilih secara umum. Gerakan ini menekankan adanya reformasi birokrasi pada pemerintahan

Usmani dengan penyatuan antara tradisi Usmani dan pemikiran Barat. Dengan adanya situasi pemerintahan yang demikian, rakyat merasa tidak mempunyai kebebasan berpendapat. Dan muncullah sebuah gerakan oposisi terhadap sistem pemerintahan yang dipakai oleh Sultan Abdul Hamid II. Kritik dan kecaman datang dari berbagai pihak, baik dari kalangan umum, kalangan akademik (perguruan tinggi), kelompok militer, kelompok sipil dan kaum intelegensia. Mereka memandang tindakan-tindakan penguasa sudah banyak yang menyimpang dari perundang-undangan dan jauh dari memperjuangkan kepentingan rakyat.

Gerakan-gerakan pembaharuan ini pada akhirnya melahirkan generasi yang condong kepada pemikiran Barat yang telah maju. Setelah gerakan Usmani muda dihancurkan oleh Sultan yang kemudian berkuasa secara absolut lalu pemimpin-pemimpinnya ditangkap dan sebagian lari ke Paris. Pada tahun 1889 di Prancis terbentuklah apa yang disebut gerakan Turki Muda (*jeunes turcs*) yang pada mulanya mempertahankan kerjasama dengan dinasti Usmani namun menginginkan suatu rezim parlementer dan konstitusional yang membatasi kekuasaan Sultan. Diantara Tokoh-tokoh pimpinan gerakan ini adalah seorang Usmani militan bernama Ahmet Riza yang mendirikan sebuah komite kecil bernama *Ittihat ve Terakki Cemiyyeti* (Committee of Union and Progress, CUP) yang menentang absolutisme Sultan dan menerbitkan surat kabar *Mesveret* yang berbahasa Usmani dan Prancis yang berisi kritikan terhadap Sultan dan pemerintahan Usmani dari tahun 1895 dan seterusnya. CUP, organisasi bentukan

Ahmet Riza ini berkembang pesat dan tampaknya akan melakukan kudeta di tahun 1896 namun dapat digagalkan oleh polisi Sultan dan kebanyakan pemimpinnya diasingkan di pengasingan dalam negeri.

Tokoh berikutnya adalah Pangeran Sabahettin yang masih famili kerajaan, ia menerbitkan majalah *Terekki* (kemajuan) dan menyerukan perubahan mendasar pada struktur kolektif masyarakat Usmani menjadi masyarakat individual seperti masyarakat eropa. Anggapannya bahwa masyarakat individual akan lebih cepat maju ketimbang masyarakat yang bergantung kepada kelompoknya. Tokoh selanjutnya adalah Mehmed Murad yang berasal dari Kaukasus dan lari ke Istanbul di tahun 1873 akibat peberontakan yang terjadi di daerahnya. Ia mencoba memberi nasehat kepada Sultan agar diadakan perubahan-perubahan pada sistem pemerintahan, tapi ditolak oleh Sultan dan akhirnya terpaksa lari ke Eropa. Ia juga menerbitkan majalah dengan nama *Mizan* (timbangan). Pergerakan yang mendukung konstitusi Usmani mengalami kemunduran selama hampir sepuluh tahun berikutnya ketika lahan perjuangan mereka berpindah ke daerah pengasingan di eropa. Kebanyakan pergerakan mereka diisi oleh orang-orang Turki Muda yang berhasil melarikan diri dari tempat-tempat pengasingan mereka. Ketika itu terjadi perpecahan diantara para pemimpin Turki Muda. Kubu Ahmet Riza yang lebih nasionalis dan sentralis dan kubu Pangeran Sabahettin yang lebih bersifat Liberal dan desentralistik. Ahmed Riza berpendapat bahwa kemajuan negara usmani harus dimulai dengan pribadi Sultan yang kuat yang mampu mengatur wilayah-wilayahnya serta mau

meninggalkan absolutisme dengan merubah haluan politiknya. Membentuk parlemen dan undang-undang yang menekankan reformasi birokrasi dan revolusi pendidikan. Ia juga berpendapat bahwa kerajaan seharusnya mengutamakan unsur Muslim-Turki. Sedangkan Pangeran Sabahettin menghendaki sebuah pemerintahan federasi dan pemberian otonom bagi warga kristen dan minoritas lainnya. Ia juga setuju dengan pendapat Ahmed riza yang menekankan revolusi pendidikan dengan mencontoh ala barat.

Gerakan *Ittihad ve terekki Cemiyeti* atau CUP dalam perjuangannya berhasil menekan Sultan agar segera membentuk kostitusi. Ini dikarenakan beberapa tokohnya sepakat untuk menggulingkan Sultan dan memprovokasi militer untuk melakukan pemberontakan pada tahun 1908. Bergabungnya mahasiswa Akademi Militer dan personal angkatan bersenjata kerajaan Usmani memberi warna revolusioner bagi Turki Muda. Pemberontakan ini dipimpin oleh Enver bey, Jemal Pasha, Mustafa Kemal, Ahmed Riza dan Ahmed Niyazi dan berpusat di Salonika. Para pemberontak menuntut restorasi konstitusi 1876 dan pengaktifan kembali sistem pemerintahan perlemen yang telah lama dibekukan Sultan. Oleh karena dukungan yang besar terhadap pemberontakan ini Sultan Abdul Hamid II terpaksa menyetujui pemberlakuan kembali konstitusi dan pengaktifan perlemen. Parlemen baru ini dipimpin oleh Ahmen Riza dari CUP. Hal ini disambut gembira di seluruh wilayah kerajaan Usmani. Orang-orang dari CUP dan Turki Muda menguasai sebagian besar perlemen, dan satu harapan

besar mulai muncul bagi berjalannya cita-cita pembaharuan.¹Dalam lapangan pembaharuan, CUP membawa perubahan-perubahan dalam bidang administrasi yang kemudian menjadi kerangka bagi pemerintahan lokal dan daerah dari Turki zaman sekarang. Administrasi kota Istanbul diperbaharui, transportasi umum diadakan, demikian pula brigade kebakaran. Organisasi kekuatan polisi disesuaikan dengan kebutuhan zaman modern.

Dalam bidang ekonomi langkah-langkah yang mengarah pada ekonomi nasional diambil atas inisiatif dari para pemimpin CUP. Perdagangan yang pada umumnya berada ditangan orang asing mulai berpindah ketangan orang-orang Turki. Pendidikan juga mendapatkan perhatian khusus. Sekolah-sekolah dasar dan menengah baru didirikan dan untuk mengatasi kebutuhan akan guru dibentuk pula sekolah guru. Universitas Istanbul yang berdiri sejak zaman Sultan Abdul Hamid II diperbaharui organisasinya. Pintu sekolah-sekolah sampai universitas dibuka pula untuk kaum wanita dan muncullah dokter-dokter, hakim-hakim, dan sebagainya di kalangan wanita Turki. Dalam bidang publikasi kemajuan cepat diperoleh dengan dicetaknya buku-buku dan surat kabar sampai mencapai jumlah 60 ribu copi. Berbagai majalah baru timbul dalam bidang sastra, politik dan sebagainya, ide-ide yang dimuat dalam majalah itu bersumber dari prancis, antara lain teori filsafat positivisme Auguste Comte. Pakaian pun mengalami perubahan dan kaum wanita mulai memakai pakaian-pakaian eropa meskipun

¹ Hasan Asari, *Modernisasi Islam Tokoh, Gagasan dan Gerakan*(Bandung: Citapustaka Media, 2002), 123.

masih terbatas dan masih menunjukkan pola tradisionalnya tidak seperti pada zaman Attaturk.² Namun ditengah impian untuk mengembangkan pembaharuan setelah keberhasilan mereka merebut kekuasaan. Tantangan lain muncul sebagai konsekwensi dari pemikiran tentang persatuan dan konstitusi, yaitu mungkinkah mempersatukan rakyat Usmani yang terdiri dari berbagai ras, bangsa dan agama itu dengan satu konstitusi? Realistis kah cita-cita untuk mempersatukan antara penduduk Muslim, Yahudi dan Kristen? Orang Yunani dengan orang Arab, atau orang Albania dengan orang persia. Bila tidak, persatuan jenis apa yang harus diwakili oleh konstitusi. Dengan kata lain, orang-orang Turki Muda dengan Komite Persatuan Pembangunannya (CUP) yang berkuasa dituntut menjawab pertanyaan mendasar yaitu Identitas kerajaan Usmani selanjutnya yang harus menjadi karakter utama kerajaan.

Lalu yang terjadi adalah mereka tetap mempertahankan struktur birokrasi kerajaan Usmani secara resmi dengan menekankan unsur Turki, dengan perlemen yang didominasi secara mencolok dari unsur Turki. Ini menimbulkan protes dari golongan dan bangsa lain diluar Turki. Lalu pada akhirnya CUP harus memilih; memerintah secara absolut untuk mempertahankan kekuasaannya atau bersedia merubah haluan politiknya secara drastis. Kekacauan demi kekacauan pun bermunculan. Stabilitas pemerintahan tidak juga didapatkan dan semakin jauh dari cita-cita pembaharuan semula, posisi Turki Muda dalam pemerintahan

² Harun Nasution, *Pembaharuan Dalam Islam* (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1975), 118.

memang tidak kuat dan Ini memungkinkan Sultan Abdul hamid mengembalikan kekuasaannya. Namun Enver Pasya segera bertindak cepat dengan memasuki Istanbul dan merampas kekuasaan serta menggantikan Sultan Abdul Hamid II dengan saudaranya Mehmed V. Di Tahun 1912 diadakan pemilihan umum dan CUP mendapatkan kemenangan besar sekali lagi. Parlemen sepenuhnya mereka kuasai dan kantor pusat organisasi dipindahkan dari Salonika ke Istanbul. Kekuasaan pun jatuh ke tangan tiga serangkai yaitu Enver Pasya, Talat Pasya dan Jemal Pasya. Namun kekuasaan mereka segera berakhir setelah melakukan perjanjian persekutuan rahasia dengan Jerman yang menyebabkan Kerajaan terseret dalam Perang dunia I yang berakhir dengan kekalahan Usmani dan pendudukan Istanbul oleh Sekutu. CUP pun membubarkan diri dan pemimpin-pemimpinnya lari ke luar negeri.³

Tokoh-tokoh Turki Muda, antara lain adalah Ahmad Riza (1859-1930), Mehmed Murad (1853-1912) dan Pangeran Sahabuddin (1887-1948).⁴

1. Ahmad Riza Ahmad Riza adalah anak seorang bekas anggota parlemen bernama Injilis Ali. Dalam pendidikannya ia sekolah di pertanian untuk kelak dapat bekerja dan berusaha mengubah nasib petani yang malang dan studinya ini diteruskan di Perancis sekembalinya ia dari perancis ia bekerja di Kementerian Pertanian, tapi ternyata hubungan pemerintah dengan petani

³Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam*(Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1975),117.

⁴ Harun Nasution, *Perkembangan Modern dalam Islam* (Jakarta:Yayasan obor Indonesia,1985),120.

yang miskin sedikit sekali, karena kementerian itu lebih disibukkan dengan birokrasi. Kemudian ia pindah ke Kementerian Pendidikan namun disini juga disibukkan dengan birokrasi tapi kurang disibukkan dengan pendidikan.

Pembaharuan yang dilakukan oleh Ahmad Riza antara lain adalah ingin mengubah pemerintahan yang absolut kepada pemerintahan konstitusional.

Karena menurutnya akan menyelamatkan Kerajaan Utsmani dari keruntuhan adalah melalui pendidikan dan ilmu pengetahuan positif dan bukan dengan teologi atau metafisika. Adanya dan terlaksananya program pendidikan yang baik akan berhajat pada pemerintahan yang konstitusional.

2. Mehmed Murad (1853-1912). Mehmed Murad berasal dari Kaukasus dan lari ke Istanbul pada tahun 1873 yakni setelah gagal pemberontakan Syekh Syamil di daerah itu. Ia belajar di Rusia dan di sanalah ia berjumpa dengan ide-ide Barat, namun pemikiran Islam berpengaruh pada dirinya.

Ia berpendapat bahwa bukanlah Islam yang menjadi penyebab mundurnya Kerajaan Utsmani dan bukan pula rakyatnya, namun sebab kemunduran itu terletak pada Sultan yang memerintah secara absolut. Oleh karena itu, menurutnya kekuasaan Sultan harus dibatasi. Dalam hal ini dia berpendapat bahwa musyawarah dalam Islam sama dengan konstitusional di dunia Barat. Ia mengusulkan didirikan satu Badan Pengawas yang tugasnya mengawasi jalannya undang-undang agar tidak dilanggar oleh pemerintah. Di samping itu diadakan pula Dewan syariat agung yang anggotanya tersusun dari wakil-

wakil negara Islam di Afrika dan Asia dan ketuanya Syekh Al-Islam Kerajaan Utsmani.

3. Pangeran Sahabuddin (1887-1948). Pangeran Sahabuddin adalah keponakan Sultan Hamid dari pihak ibunya, sedang dari pihak bapaknya adalah cucu dari Sultan Mahmud II, oleh karena itu ia keturunan raja. Namun ibu dan bapaknya lari ke Eropa menjauhkan diri dari kekuasaan Abdul Hamid. Maka dengan demikian kehidupan Sahabuddin lebih banyak dipengaruhi oleh pemikiran Barat. Menurutnya yang pokok adalah perubahan sosial, bukan penggantian Sultan. Masyarakat Turki sebagaimana masyarakat Timur lainnya mempunyai corak kolektif, dan masyarakat kolektif tidak mudah berubah dalam menuju kemajuan. Dalam masyarakat kolektif orang tidak percaya diri sendiri, oleh karena itu ia tergantung pada kelompok atau suku sedangkan masyarakat yang dapat maju menurutnya adalah masyarakat yang tidak banyak bergantung kepada orang lain tetapi sanggup berdiri sendiri dan berusaha sendiri untuk mengubah keadaannya.⁵

B. Menjelang Kemerdekaan Turki Usmani

1. Biografi Mustafa Kemal Attatruk dan peranannya

Mustafa Kemal Pasya, yang kemudian hari dikenal dengan Mustafa Kemal Ataturk, merupakan pendiri dan presiden pertama Republik Turki. Ia dilahirkan di Salonika pada tahun 1881 dari keluarga modern. Kakeknya

⁵ Hamka, *Sejarah Umat Islam III*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1981), 603.

adalah seorang guru sekolah dasar di Salonika, dan bapaknya Ali Riza Efendi, merupakan pegawai pabean yang setelah pensiun menjadi seorang pedagang kayu.⁶Pada tahun 1893, atas dorongan ibunya Zubaida Hanim, ia masuk sekolah rusdiye, sekolah setempat. Di sekolah ini ia kemudian diberikan tambahan nama oleh gurunya menjadi Mustafa kemal. Namun, beberapa hari sekolah Mustafa Kemal Ataturk merasa tidak cocok. Ia kemudian dipindahkan ayahnya – yang meninggal dunia saat Mustafa Kemal Ataturk berusia 7 tahun – ke sekolah rakyat Shemsi Efendi, yang menggunakan metode modern di dalam pendidikannya. Tahun 1895, Mustafa Kemal Ataturk, memasuki masuk ke Akademi Militer di kota Manastir, dan pada tanggal 13 Maret 1899 ia masuk perguruan tinggi perang di Istanbul sebagai seorang kadet pasukan infantri, yang kemudian lulus pada bulan Januari 1905 dengan pangkat Kapten Staf. Semasa mengenyam pendidikan, bersama teman-temannya Mustafa Kemal Ataturk banyak membaca tulisan-tulisan Nanik Kemal dan beberapa karya tokoh Turki Muda. Perkenalannya dengan pemikiran-pemikiran tersebut membuat Mustafa Kemal Ataturk bersikap kritis. Ia menaruh perhatian besar pada perkembangan politik saat itu. Bersama anggota kelompok kadet lain, ia menerbitkan surat kabar yang ditulis dengan tangan untuk disebar di antara mereka sebagai gerakan oposisi.⁷ Aktivitas-

⁶ Rasyid Feroze, *Islam and Secularism in Post-Kemalist Turkey*, (Islamic Reseach Institute, Pakistan: Islamabad,1976),72; Juga Mustafa Baydar, *Ataturkle Konusmalar*, (Istanbul, 1960), 30-31; Baca juga A. Mukti Ali, *Islam dan Sekularisme di Turki Modern*, (Jakarta: Djambatan, 1994), 72.

⁷ A. Mukti Ali, *Islam dan Sekularisme di Turki Modern*(Jakarta:Djambatan,1994),73.

aktivitas ini membuat Mustafa Kemal Atatürk akhirnya ditahan, dan ia harus meringkuk di penjara beberapa bulan.

Setelah dibebaskan, Mustafa Kemal Atatürk memulai karirnya di bidang kemiliteran. Ia ditugaskan bergabung dengan pasukan Kelima di Damaskus untuk menumpas pemberontakan kaum Druzz. Selama empat bulan di Damaskus (Siria), ia mendirikan organisasi politik rahasia dengan nama *Hurriyet Cemiyeti*. Ia melakukan perjalanan ke Jaffa, Beirut serta Yerusalem, dan kemudian berhasil mendirikan cabang-cabang organisasi rahasianya di kota-kota tersebut. Pada tahun 1907, Mustafa Kemal Atatürk dipromosikan ke pangkat Mayor dan ditugaskan pada pasukan Ketiga di Macedonia. Di tengah karir militernya ia tetap melakukan kegiatan politik. Saat masa tugas tersebut, ia menjalin kontak (meskipun tidak terlalu dekat), dengan kelompok CUP. Atas permintaan sendiri Mustafa Kemal Atatürk akhirnya ditempatkan di Salonika. Di kota ini ia mendirikan organisasi yang diberi nama "*Union and Progress*" (Persatuan dan Kemajuan). Ia berada di Salonika pada waktu revolusi Turki Muda tahun 1908 meletus. Sewaktu kembali ke Istanbul, ketika perang Balkan yang pertama selesai, Mustafa Kemal Atatürk mengambil peran di pasukan Ketiga belas dengan pangkat Komandan. Mereka berhasil mempertahankan Gallipoli dari serangan Inggris tahun 1915. Setelah kemenangan tersebut karir militernya menanjak dengan

cepat.⁸ Di tahun 1916, tanggal 27 Pebruari, ia diangkat menjadi komandan wilayah Diyarbakr dengan pangkat Jenderal.

Kemenangan singkat (7-8 Agustus 1916) ketika menghadapi Rusia memungkinkan Mustafa Kemal Ataturk mencaplok Bitlis dan Mus ke dalam wilayah Turki. Hal ini membuat namanya semakin disegani dan dikenal luas. Namun, meski namanya serta pengalamannya di bidang militer semakin besar, Mustafa Kemal Ataturk tidak dapat berkiprah banyak di Istambul. Karena sultan yang tinggal di pusat kekuasaan (Istambul) tidak menyukai para kelompok nasionalis. Menyadari kondisi ini, Mustafa Kemal Ataturk menyingkir ke Anatolia untuk memulai karir politik kembali. Di Anatolia, ia giat melakukan upaya cita-citanya, yaitu mewujudkan sebuah pembaharuan bagi bangsa Turki untuk menjadi sebuah negara Turki modern. Dengan berkiprah di *Association for the Defence of the Right of Eastern Anatolia*, sebuah pergerakan bagi perjuangan hak-hak masyarakat Anatolia Timur yang didirikan di Erzurum 3 Maret 1919, asosiasi ini akhirnya menjadi alat perjuangan politik Mustafa Kemal Ataturk di masa depan.⁹ Dan di tanggal 6 Desember 1922, Mustafa Kemal Ataturk menciptakan instrumen politik baru dengan mendirikan Partai rakyat. Ia mengundang seluruh komponen anak bangsa untuk berkomunikasi secara langsung dan terbuka, yang

⁸ Syafiq A. Mughni, *Sejarah Kebudayaan Islam di Turki*(Jakarta:Logos,1997),146.

⁹ *Ibid.*, 147.

menyebabkan *Grand National Assembly* membubarkan diri untuk kemudian mempersiapkan dilaksanakannya sebuah pemilu.

Tanggal 11 Agustus 1923 merupakan hari bersejarah, sebab anggota *Assembly* baru hasil pemilu yang terdiri dari 286 anggota perwakilan memilih akhirnya Mustafa Kemal Atatürk menjadi Presiden Republik Turki pertama dengan Fethi sebagai Perdana Menteri. Bersama negara baru tersebut, Turki tidak lagi berdiri atas dasar dinasti, kerajaan, maupun agama. Lewat ibu kota baru Ankara, Turki dikokohkan berdasarkan *nation* (bangsa). Mustafa Kemal Atatürk selama perjuangan politiknya hidup membujang. Sampai akhirnya ia memenangkan perang kemerdekaan, ia lalu mengawini Latifa Hanim, puteri Usakizade Muammer, seorang pedagang kaya dari Izmir. Sayang sekali perkawinan tersebut tidak berumur panjang dan berakhir dengan perceraian disebabkan Mustafa Kemal terlalu sibuk dengan kewajiban-kewajibannya sebagai kepala negara Turki yang baru didirikan. Tugas-tugas berat sebagai pembaharu (reformer) ini, lalu mempercepat kematiannya. Setelah sakit agak lama, pada tanggal 10 November 1938, ia meninggal di Istanbul pada usia 57 tahun.

Kemenangan tentara Mustafa Kemal tahun Agustus 1922 menandai berakhirnya Perang Turki dan berdirinya Republik. Di bawah kepemimpinan Kemal, republik baru mulai mengadakan serangkaian reformasi radikal yang bertujuan untuk merubah Turki menjadi negara sekuler modern. Dengan mengikuti model laicite Perancis (laiklik dalam bahasa Turki), para

pendukung gerakan Kemal berusaha untuk membatasi peran agama hanya sebagai sistem kepercayaan privat, yang terpisah dari ruang publik. Ideologi baru ini diimplementasikan melalui dikeluarkannya serangkaian kebijakan dan hukum antara tahun 1922 dan 1935. Diantara perubahan radikal itu adalah penghapusan sistem kekhalifahan, penutupan sekolah-sekolah Islam tradisional (*madrasa*), dan pembubaran pengadilan agama pada tahun 1924. Pada tahun-tahun berikutnya, rezim baru mulai membubarkan sejumlah tarikat, melarang pemakaian tutup kepala khas dinasti Utsmani (*fez*) bagi laki-laki, menghalangi perempuan untuk memakai kerudung dan mengadopsi kalender Gregorian sebagai satu-satunya kalender resmi. Pada tahun 1926, Hukum Pidana baru yang berdasarkan model Swiss mulai diadopsi. Pengadopsian ini menandai berakhirnya hubungan hukum negara dengan syariah sekaligus dimulainya pengenalan undang-undang pernikahan dan perceraian sipil. Pada tahun 1928, negara mulai mendeklarasikan diri sebagai negara sekuler, Islam tidak lagi dianggap sebagai agama resmi negara dan alfabet Turki yang sudah dilatinkan pun mulai diadopsi. Hari minggu ditetapkan sebagai libur mingguan resmi pada tahun 1935.¹⁰

Namun demikian, bentuk sekularisme Kemalian ini didesign agar negara bisa mengontrol agama, daripada sekedar menyingkirkannya dari ruang publik. Satu langkah penting yang diambil dalam proses ini adalah mengontrol ulama dan tarikat sufi melalui berbagai cara termasuk menetapkan

¹⁰ Tim Jacoby, *Social Power and The Turkish State* (London: Frank Cass Publishers), 80.

undang-undang mengenai penyatuan sistem pendidikan yang menjadi landasan hukum bagi penutupan seluruh madrasah dan pelimpahan seluruh urusan pendidikan pada kekuasaan kementerian pendidikan. Pemakaian baju tradisional (termasuk fez dan turban) oleh ulama juga dilarang, dan mereka tidak lagi diperbolehkan untuk memakai gelar yang melambangkan otoritas keagamaan seperti "alim" atau "syeikh". Pada tahun 1928 pengadopsian alfabet Roma dan pelarangan pengajaran Bahasa Arab dan Persia dilakukan untuk menghancurkan hubungan kultural dan intelektual antara dinasti utsmani lama dengan dunia Islam modern.¹¹

Usaha-usaha ini juga menandakan bahwa Ulama tidak lagi memainkan peran signifikan dalam masyarakat. Pengetahuan yang mereka kuasai dan wakili dipandang tidak lebih sebagai peninggalan masa lalu dan hambatan bagi usaha negara untuk menghadirkan modernitas dalam masyarakat Turki. Kesempatan mereka untuk bekerja dengan pengetahuan dan pengalaman pendidikan yang mereka miliki kini terbatas pada masjid dan institusi-institusi keagamaan. karena institusi-institusi itu pun dikontrol dan dibiayai oleh negara, independensi ulama pun dilumpuhkan secara efektif. kelas intelektual lama tergantikan oleh kelas intelektual baru yang berusaha untuk memutuskan ikatan masa lalu dan membangun negara dengan budaya

¹¹ Niyazi Berkes, *The Development of Secularism in Turkey*, 477.

sekuler baru. Sebagai contoh, Institut Sejarah Turki mulai menulis sejarah Turki dan Institut Bahasa Turki membentuk ulang bahasa Turki.¹²

Reformasi yang dilakukan oleh kelompok Kemal Attaturk dipaksakan oleh negara dan hanya mendapatkan justifikasi yang kecil dari publik.¹³ Penting untuk dicatat bahwa gerakan ini tidak dimotivasi oleh ateisme maupun oleh pandangan anti-islam. Mustafa Kemal malah selalu menekankan kesetiaannya kepada Islam. pada tahun 1923, ia misalnya menyatakan: "Agama kita adalah agama yang paling masuk akal dan alami. Karena itulah, agama kita menjadi agama terakhir. Agama yang alami harus sesuai dengan akal, ilmu pengetahuan, teknologi dan logika. Dan agama kita memang memenuhi persyaratan itu."¹⁴ Jadi, usaha Mustafa Kemal untuk mensekularkan Turki lebih dimotivasi oleh pragmatisme dan keinginan untuk menghilangkan model negara dinasti Utsmani termasuk menghapuskan penerapan syari'at yang telah digunakan oleh Eropa sebagai alasan untuk melakukan intervensi terhadap urusan dalam negeri Turki.

Ia melihat bahwa penghapusan simbol-simbol lama itu merupakan langkah yang penting bagi Turki agar bisa menjadi negeri yang benar-benar independen dari hegemoni dan campur tangan Barat. Ia bahkan menganggap reformasi yang dilakukannya sebagai upaya untuk melindungi Islam, untuk

¹² Geoffrey Lewis, *The Turkish Language Reform: A Catastrophic Success* (Oxford: Oxford University Press, 2002),117.

¹³ İlber Ortaylı, *İmparatorluğun En Uzun Yılı* [The Longest Century of the Empire] (Istanbul: Hil Yayın, 1995),204-234.

¹⁴ As quoted in Borak S. (ed.), *Atatürk ve Din* [Ataturk dan Agama] (Istanbul: Anıl, 1962), 34.

memisahkan agama yang suci dari politik yang kotor. Kemal dan pendukungnya beranggapan bahwa pengadopsian norma dan institusi modern memang mengharuskan dikorbankannya beberapa pemahaman agama tradisional. Dan hanya itulah cara bagi ummat Islam untuk bisa bertahan secara terhormat dalam dunia modern ini. Dengan keyakinan bahwa memodernisasi dan mewesternisasi Turki merupakan jalan yang terbaik bagi negeri itu, pendukung gerakan Kemal bertujuan untuk mendidik, membimbing, bahkan jika perlu memaksa, masyarakat Turki menjadi masyarakat yang sekuler dan modern. Kharisma dan posisi Mustafa Kemal sebagai "penyelamat" dan "bapak" bangsa setelah kemenangannya dalam perang kemerdekaan digunakan untuk mempromosikan dirinya sebagai sosok yang bebas dari kesalahan, pemurah dan sangat berkuasa. Pertanyaan, kritik dan perdebatan apapun yang ditujukan pada gerakan reformasi Kemal dianggap sebagai gangguan bagi perkembangan negara. Aturan atau kebijakan apapun yang dianggap oleh negara sebagai karakter peradaban modern harus sesegara mungkin diadopsi di Turki, hingga justifikasi publik nampaknya tidak lagi diperlukan.

Institusi-institusi negara biasanya mengimplementasikan kebijakan terlebih dahulu, barulah kemudian kalangan intelektual dan jurnalis mencari pembenaran atas kebijakan tersebut. Karena khawatir akan gangguan kekuatan oposisi dan pemikiran kritis terhadap jalannya reformasi, negara membungkam dan mengasingkan siapapun yang tidak setuju atau

mempertanyakan upaya reformasi atas dasar ideologi atau perspektif apapun. Isu reformasi yang paling kontroversial yang harus dihadapi oleh republik baru adalah penghapusan sistem khalifah. Walaupun Majelis Agung Nasional Turki (GNA) telah menghapuskan kesultanan pada tahun 1922, kantor kekhalifahan dan penunjukkan anggota keluarga dinasti Utsmani sebagai khalifah masih dipertahankan. Banyak orang, termasuk tokoh gerakan nasionalis Turki seperti Ziya Gökalp, mendukung pemisahan antara Kesultanan dan Kekhalifahan, dan berusaha agar khalifah tidak memiliki peran dalam politik nasional. Khalifah hanya dianggap sebagai pemimpin spiritual komunitas Muslim global yang mungkin posisinya setara dengan Paus. Pendekatan ini, menurut pendukungnya, justru akan memperkuat institusi kekhalifahan karena pengaruhnya akan meluas secara internasional sebagai dasar kesatuan bagi Ummat Islam di zaman baru. Sementara itu, bangsa Turki sendiri akan menjadi penjaga kekhalifahan.¹⁵

Sementara tokoh lain, seperti Mustafa Kemal, memandang bahwa keberadaan khalifah yang menjadi peninggalan sejarah seperti itu akan mengancam kedaulatan nasional republik yang baru berdiri.¹⁶ Kelompok ini menentang usulan untuk menjadikan khalifah sebagai pemimpin agama internasional sebagai usulan yang tidak mungkin. Karena menurut kelompok

¹⁵ Ziya Gökalp, "The Real Meaning of the Caliphate" in *Küçük Mecmua* [*Minor Magazine*] (No. 24, Nov. 27, 1922), 1-6; Ziya Gökalp, "Functions of the Caliphate" in *Küçük Mecmua* [*Minor Magazine*] (No. 26, Dec. 11, 1922), 1-5.

¹⁶ Faruk Alpkaya, "Türkiye Cumhuriyeti'nin Kuruluşu: 1923-1924" [Dasar Republik Turki 1923-1924] (Istanbul: İletişim, 1998), 199.

ini, institusi kekhalifahan pun bukanlah institusi yang benar-benar Islami, melainkan penyesuaian dari pemerintahan kesultanan. Kelompok ini tidak menerima kemungkinan pendefinisian ulang institusi kekhalifahan dalam konteks Islam dan juga tidak percaya percaya bahwa pendefinisian ulang itu adalah sesuatu yang diinginkan. Mereka bahkan melihatnya sebagai mimpi yang tidak berguna, yang tidak mungkin bisa dicapai oleh republik baru.¹⁷ Menarik untuk dicatat bahwa mereka yang berusaha menghapuskan institusi kekhalifahan berusaha menjustifikasi pandangan mereka dengan argumen-argumen keagamaan maupun alasan-alasan politik. Seyyid Bey, Menteri Kehakiman, misalnya menyebarkan pamflet dan berbicara di hadapan anggota Majelis Nasional (GNA). Ia berargumen bahwa baik Qur'an atau Sunnah tidak mempunyai penjelasan apapun mengenai kekhalifahan, dan ini berarti bahwa institusi ini bukan institusi keagamaan, melainkan institusi yang bersifat duniawi dan politis. Al-Qur'an, menurut Seyyid Bey, hanya menyebut dua prinsip yang berkaitan dengan sistem pemerintahan yang tepat: yaitu ide mengenai musyawarah (*mesheverret*) dan ketaatan kepada pemilik otoritas (*ulû'l emr*).

Islam dengan demikian tidak menuntut adanya bentuk pemerintahan tertentu, dan bentuk pemerintahan apapun yang mengikuti prinsip-prinsip tadi bisa dianggap sah. Dengan demikian pula, tidak ada hambatan dalam syariah untuk mengakui pemerintahan parlementer, dan di zaman modern ini hanya

¹⁷ Yunus Nadi, "Two Servants of Britain," in *Anadolu'da Yeni Gun Daily* (Jan. 18, 1924)

pemerintahan parlementer lah yang secara sah bisa merealisasikan prinsip-prinsip islam tentang musyawarah dan tertib hukum. Menurutnya, otoritas khalifah tradisional secara umum (wilaya al 'Amma) yang berupa tanggung jawabnya terhadap urusan-urusan publik justru berdasarkan akad wikalah (*aqd-i Wakâlet*), dimana Khalifah adalah agen bangsa dan kekuasaannya berasal dari kehendak dan pilihannya. Menurut Seyyid Bey, institusi kekhalifahan yang berdiri bukan melalui pilihan komunitas Muslim berarti tidak sah menurut syari'ah. Dia kemudian menyimpulkan bahwa tidak ada institusi kekhalifahan yang sah sepeninggal Ali, Khalifah IV, karena setelahnya kekhalifahan diambil alih melalui kekuatan dan bukan melalui kehendak ummat.¹⁸Debat mengenai penghapusan institusi kekhalifahan muncul bersamaan dengan debat mengenai penghapusan syari'ah dan wakaf dan pentingnya mereformasi sistem pendidikan dengan mengintegrasikan pengelolaan madrasah di bawah kementrian pendidikan. Meskipun semua usulan tersebut diajukan oleh GNA, banyak anggota majelis ini yang mengungkapkan kekhawatirannya terhadap usaha mempersempit peran agama hanya sebagai urusan akhirat dengan berargumen bahwa agama, bagaimanapun, akan selalu mempengaruhi politik. Anggota majelis lainnya malah beranjak lebih jauh. Mereka beranggapan bahwa Islam berbeda dengan

¹⁸ Seyyid Bey, "*Hilafet ve Hakimiyet-i Milliye*" [Khalifah dan Kedaulatan Nasional] (Ankara, 1923),27-28.

Kristen dan tidak bisa dipisahkan dari urusan-urusan duniawi lainnya posisi agama di negara-negara Eropa.¹⁹

Debat parlementer yang terjadi di masa republik awal ini tak pelak lagi memberikan legitimasi bagi gerakan reformasi Mustafa Kemal. Namun setelah dijalankan, program reformasi ini diperlakukan negara sebagai sesuatu yang tidak bisa dipertanyakan, hingga mengkritik Attaturk dan prinsipnya menjadi sebuah tindak kejahatan. Sejak saat itu, enam prinsip Kemalisme (Republikanisme, Nasionalisme, Popularisme, Stateism, Sekulerisme dan Revolusionisme) dianggap sebagai fondasi abadi rezim modern yang tak bisa disentuh. Semua intelektual diharuskan mendukung ideologi resmi negara seperti yang terangkum dalam enam prinsip tadi secara terbuka. Enam prinsip ini juga harus menjadi bagian kurikulum di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi, tak peduli apapun jurusannya. Para pelajar dan mahasiswa diharuskan mengambil mata kuliah mengenai prinsip-prinsip itu berulang-ulang agar bisa menginternalisasi prinsip-prinsip Attaturk dan menegakkan peninggalaan revolusionernya. Debat apapun mengenai sekulerisme harus menegaskan ulang komitmen terhadap prinsip-prinsip Attaturk terlebih dahulu karena prinsip-prinsip ini sejak awal telah menjadi model yang terbaik bagi Turki dan tidak pernah bisa dipertanyakan atau dirubah.

Karena hambatan, keterbatasan dan pembatasan hukum seperti ini, maka debat publik yang bebas mengenai sekulerisme dan masalahnya menjadi

¹⁹ Alpkaya, "Türkiye Cumhuriyeti'nin Kuruluşu" [Dasar Republik Turki], 231.

hal yang sangat sulit di Turki. Akibatnya, ekspresi ketidakpuasan terhadap praktik sekularisme pada saat itu tidak terdokumentasikan. Yang jelas, mayoritas masyarakat Turki memang mendukung sistem pemerintahan yang sekuler. Jadi, keluhan masyarakat sebetulnya cenderung diarahkan pada praktik otoritarian negara seperti pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang sebetulnya tidak sejalan dengan prinsip negara demokrasi modern daripada terhadap sistem sekuler itu sendiri. Banyak sejarawan Turki yang terkesan terhadap betapa dalam dan beragamnya debat mengenai agama dan politik yang terjadi pada akhir masa pemerintahan dinasti Utsmani (akhir abad 19 dan permulaan abad 20) dan mereka mengekspresikan ketidakpuasannya terhadap kepalsuan wacana yang berkembang di abad ke-20 hingga sekarang.²⁰

Untuk mengakhiri bagian ini dan memperkenalkan bagian selanjutnya, ada baiknya bila saya menyinggung perkembangan politik sejak berdirinya Republik hingga saat ini. akhir Perang Dunia I menandai runtuhnya Dinasti Utsmani dan berkurangnya wilayah kekuasaannya. Mustafa Kemal tak lama kemudian memimpin revolusi perlawanan terhadap rezim Utsmani lama dengan sukses dan pada tahun 1922 republik baru pun didirikan. Republik baru ini melakukan proses reformasi yang sangat cepat yang ditujukan untuk merubah kehidupan politik dan sosial bangsa Turki dengan melakukan

²⁰ Etyen Mahçupyan, 'Laiklik ve Hazımsızlı' [Sekularisme dan Intoleransi/Lemahnya Internalisasi], *Zaman* newspaper (Juni, 20, 2005)

sekularisasi dan westernisasi serta membatasi dan mengontrol peran agama dan juga institusinya. Partai Mustafa Kemal, Partai Republik Rakyat (CHP) memerintah Turki sampai munculnya era sistem multi partai pada pertengahan abad 20. serangkaian kup militer (yang terjadi pada tahun 1960, 1971, 1980, dan 1997) yang terjadi di Turki sebagai reaksi militer atas ancaman yang bisa menghancurkan karakter sekuler negara Turki menyebabkan demokrasi negeri ini lebih bercorak otoritarian. Protes-protes terutama yang muncul dari kelompok agama atau etnis yang berbeda dengan rezim ditekan sedemikian rupa. Namun, perkembangan mutakhir di Turki seperti terpilihnya partai sekular namun pro Islam (AKP) dalam pemerintahan dan keputusan Turki untuk mendapatkan keanggotaan penuh dari Uni Eropa nampaknya akan meningkatkan kualitas demokrasi dan perlindungan terhadap hak asasi manusia di negeri itu. Namun kita masih harus melihat apakah trend positif ini masih akan berlanjut atau tidak.

Walaupun posisi Islam sebagai agama resmi negara telah dicabut pada tahun 1928 dan pandangan sekularisme Republik diteguhkan kembali dalam Undang-Undang dasar tahun 1937, partai tunggal penguasa (CHP) harus berhadapan dengan realitas politik Islam ketika kebijakan multi partai mulai kembali diberlakukan pada tahun 1946. CHP harus merevisi pandangan buruknya tentang Islam ketika para pemimpin partai ini menyadari bahwa rival kuat mereka yang baru muncul, Partai Demokrat, berhasil menarik simpati kalangan konservatif. Beberapa anggota parlemen dari CHP juga

beranggapan bahwa reformasi sekularisme telah berjalan terlalu jauh dengan menyebabkan terjadinya kevakuman moral dan etik dalam sosialisasi anak muda.²¹ CHP memperkenalkan kembali pelajaran agama yang bebas dipilih oleh siswa di sekolah, membuka sekolah-sekolah untuk melatih para Imam dan da'i dan mendirikan Fakultas Teologi di Universitas Ankara.

Namun pada saat yang sama, CHP juga menambahkan artikel 163 ke dalam Hukum Kriminal untuk memberikan sanksi kepada "propaganda keagamaan yang melawan negara sekuler."²² Partai Demokrat, pada masa pemerintahannya, pun tetap menyatakan komitmennya pada sekularisme sebagai prinsip dasar negara, namun partai ini berusaha untuk mencari dukungan politik dari kelompok-kelompok Islam semacam Nur Cemmati yang dipimpin oleh Bediüzzaman Said Nursi. Namun kup militer tahun 1960 mengakhiri aliansi ini, nampaknya, karena jenderal-jenderal militer beranggapan bahwa Said Nursi sedang berusaha mendirikan negara teokratis di Turki.²³ Penting untuk membicarakan peran politik militer dalam mempromosikan dan mempertahankan pandangan sekularisme di Turki karena Militer pulalah yang hampir meniadakan kemungkinan bagi politik Islam untuk muncul di negeri itu.

²¹ Şerif Mardin, *Türkiye'de Din ve Siyaset Makaleler 3*, [Agama dan Politik di Turki, 3 Artikel 3] (Istanbul: İletişim, 2001),120-122.

²² Erik Jan Zürcher, *Modernleşen Türkiye'nin Tarihi* [Sejarah Modernisasi Turki] (Istanbul: İletişim, 1998),339.

²³ Şerif Mardin, *Türkiye'de Din ve Siyaset* [Agama dan Politik di Turki] (Istanbul: İletişim, 2001),120-122.

2. Pembentukan Dewan Nasional Agung

Sehabis perang dunia I ia diangkat menjadi panglima dari semua pasukan yang ada di Turki Selatan. Izmir telah jatuh dan Smyrna telah diduduki tentara sekutu, dan kewajiban Mustafa Kemal kembali membebaskan daerah itu dari kekuasaan asing dengan mendapat sokongan dari rakyat yang telah mulai membentuk gerakan-gerakan membela tanah air, ia akhirnya dapat memukul musuh mundur dan menyelamatkan daerah Turki dari penjajahan asing. Dengan teman-temannya dari pimpinan nasionalis lain Ali Paud dan Refat, ia dalam itu mulai menantang pemerintah yang datang dari Sultan Istanbul, karena perintah itu banyak bertentangan dengan kepentingan nasional Turki. Sultan di Istanbul telah berada di bawah kekuasaan sekutu dan harus menyesuaikan diri dengan kehendak mereka.

Mustafa Kemal melihat perlunya diadakan pemerintahan tandingan di Anatolia. Segera ia dengan rekan - rekannya tersebut di atas mengeluarkan maklumat yang berisi pernyataan - pernyataan berikut :

- a. Kemerdekaan tanah air sedang dalam keadaan bahaya
- b. Pemerintah di ibu kota terletak di bawah kekuasaan sekutu dan oleh karena itu tidak dapat menjalankan tugas.
- c. Rakyat Turki harus berusaha sendiri untuk membebaskan tanah air dari kekuasaan asing.

- d. Gerakan – gerakan pembela tanah air yang telah ada harus dikoordinir oleh suatu panitia nasional pusat. Untuk itu perlu diadakan kongres.²⁴

Dengan tersiarnya pengumuman ini, Musatafa Kemal diperintahkan datang ke Istanbul, tetapi ia menolak sehingga ia dipecat dari jabatannya sebagai panglima. Musatafa Kema keluar dari dinas tentara dan ia diangkat oleh perkumpulan pembela Hak-hak Rakyat cabang *Erzurum* sebagai ketua.

Kongres yang diadakan pertama kali di *Erzurum* menghasilkan untuk membela serta mempertahankan dan keutuhan tanah air dan mengadakan rapat Majelis Nasional dalam waktu singkat. Kongres kedua diadakan di Sivas dan di sini diputuskan Turki harus bebas dan merdeka dan selanjutnya dibentuk Komite Perwakilan Rakyat. Mustafa Kemal dipu dipilih sebagai ketua. Dalam pada itu, juga diadakan pemilihan untuk Parlemen di Istanbul dan golongan nasionalis memperoleh mayoritas. Namun Parlemen tidak dapat bekerja kerana selalu mendapat intervensi dari kalangan sekutu-sekutu dan akhirnya menunda pengadaaan rapat sampai waktu tidak tertentu. Banyak dari anggotanya menggabungkan diri dengan Mustafa kemal di Anotia. Atas usaha Mustafa Kemal dan teman - temannya dapat dibentuk Majelis Nasional Agung di tahun 1920. dalam sidang di Ankara, yang kemudian menjadi ibu kota Republik Turki, Dalam sidang itu diambil anantara lain keputusan-keputusan berikut.

²⁴ Harun Nasution, *Pembaharuan Dalam Islam*,(Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1975),134-139.

- a. Kekuasaan tertinggi terletak ditangan rakyat Turki
- b. Majelis Nasional Agung merupakan Perwakilan Rakyat tertinggi
- c. Majelis Nasional Agung bertugas sebagai badan legislative dan badan eksekutif
- d. Majelis Negara yang anggotanya dipilih dari majelis Nasional Agung akan menjalankan tugas pemerintah
- e. Ketua Majelis Nasional Agung merangkap sebatas Ketua Majlis Negara

Demikianlah, Mustafa Kemal dan teman-temannya dari golongan nasionalis bergerak dan dengan perlahan - lahan dapat menguasai situasi sehingga akhirnya sekutu terpaksa mengakui mereka sebagai penguasa di Turki. Pada tanggal 23 Juli 1923 ditanda tangani perjanjian lausanne dan pemerintahan Mustafa Kemal mendapat pengakuan internasional.²⁵

Di dalam sidang Majlis Nasional Agung yang diadakan ditahun 1992, Mustafa kemal menjelaskan bahwa jabatan Khalifah dan jabatan Sultan dalam sejarah terpisah, dalam arti dipegang oleh dua orang, Khalifah di Bagdad dan Sultan di daerah. Oleh Karen itu tidak ada salahnya kalau kedua jabatan yang dipegang oleh Raja Turki dipisahkan. Usul penghapusan jabatan Sultan diterima majlis Nasional Agung dan Raja Turki dengan demkian hanya memegang jabatan Khalifah dipertahankan. Usul penghapusan jabatan

²⁵ Ahmad Syaikuni, *Perkembangan Pemikiran Modern Di Dunia Isalm*(Bandung : Pustaka Setia, 1997), 52-53.

Khalifah yang tidak mempunyai kekuasaan duniawi, tetapi hanya kekuasaan spiritual.

Kemudian timbul persoalan bentuk Negara yang telah berubah organisasinya. Golongan Islam mempertahankan Khalifah dan golongan nasionalis menghendaki bentuk Republik. Melihat pada konstitusi 1921 yang didalamnya ditegaskan bahwa kedaulatan terletak di tangan rakyat, bentuk Negara baru ini harus Republik. Pada bulan Oktober 1923, Majelis Nasional Agung, sungguhpun ada suara-suara tidak setuju dari golongan Islam, mengambil keputusan bahwa Turki adalah Negara Republik. Tetapi sebagai imbalan, usulan golongan Islam di tambah satu artikel yang mengatakan agama Negara Republik Turki adalah Islam.

Mustafa Kemal melihat bahwa jabatan Khalifah juga harus dihapuskan dan soal ini dibicarakan oleh Majelis Nasional Agung di bulan Februari 1924. Perdebatan berjalan dengan sengit. Tetapi akhirnya pada tanggal 3 Maret 1924, suara di Majelis memutuskan penghapusan jabatan Khalifah. Khalifah Abdul Majid diperintahkan untuk meninggalkan Turki, dan ia bersama keluarganya pergi ke Swiss.

Dengan demikian gambaran bahwa di Republik Turki ada kepala Negara terhapus, tetapi sungguhpun demikian ide kedaulatan rakyat belum mempunyai gambaran jelas, karena artikel 2 dari konstitusi masih tetap ada, yaitu agama Negara ada, yaitu agama Negara adalah Islam. Ini mengandung arti bahwa kedaulatan bukan sepenuhnya terletak di tangan rakyat, tetapi pada

syariat. Oleh karena itu Mustafa Kemal selanjutnya ialah menghilangkan Artikel 2 dari Konstitusi 1921. Ini terjadi di tahun 1928. Negara tidak ada lagi hubungannya dengan agama. Sembilan tahun kemudian, yaitu sesudah prinsip sekularisme dimasukkan ke dalam Konstitusi di tahun 1937, barulah Republik Turki dengan resmi menjadi negara sekuler.²⁶

²⁶ Harun Nasution, *Pembaharuan Dalam Islam*(Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 141-143.